

BAB V KESIMPULAN

Timur Tengah merupakan kawasan yang sangat strategis. Wilayah ini memiliki 70% cadangan minyak bumi dan merupakan yang terbesar di dunia. Tidak heran mengapa Timur Tengah menjadi incaran Negara- Negara Barat dan Amerika Serikat. Negara- Negara tersebut melakukan berbagai cara untuk dapat menguasai Timur Tengah.

Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan Amerika Serikat adalah adanya peristiwa *Arab Spring*. Amerika Serikat menggunakan demokrasi sebagai alat untuk melakukan intervensi ini. Timur Tengah merupakan sarang teroris menjadi alasan mengapa Amerika melancarkan intervensi ini. Peristiwa 9/11 menjadi tameng Amerika dalam memperkuat alasan tersebut. Dengan menggunakan *Democracy Peace*, Amerika menekankan bahwa apabila Timur Tengah menjadi Negara demokrasi maka tidak akan terjadi perang sebagai resolusi konflik.

Arab Spring ini merupakan sebuah peristiwa dimana terjadinya proses demokrasi di Timur Tengah. Sehingga berguguranlah para pemimpin Negara- Negara Timur Tengah tersebut seperti daun- daun yang berguguran pada musim semi. Negara Timur Tengah yang terkenal otoriter kemudian didesak oleh rakyatnya untuk mengganti sistem pemerintahan. Peristiwa ini berawal dari aksi bakar diri yang dilakukan oleh seorang penjual buah di Tunisia. Kejadian ini kemudian meluas ke Negara- Negara Timur Tengah lainnya seperti Irak dan Suriah.

Irak merupakan salah satu Negara yang terkena dampak dari *Arab Spring* ini. Amerika Serikat melancarkan agresi militer besar- besarnya pada 2003. Kurang lebih sekitar 150.000 pasukan Amerika menduduki Irak secara paksa, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yakni alasan Amerika Serikat mencari serta mengamankan senjata pemusnah massal (*Weapon of Mass Destruction*) yang disebut- sebut terdapat di Irak.

Selain Irak, Negara Suriah pun terkena dampak dari *Arab Spring*. Krisis pemerintahan yang terjadi menyebabkan massa turun ke jalan dan menuntut pemerintah yang berkuasa mundur dari

jabatannya. Kondisi perekonomian yang buruk menyebabkan rakyat Suriah merasa tidak puas terhadap pemerintah. Hal ini merupakan dampak dari kronisme neo-liberal yang dikembangkan oleh Basyar Asad. Adanya pembongkaran industri- industri produktif yang sebelumnya mampu mempekerjakan banyak tenaga kerja merupakan salah satu cara pembaharuan ekonomi yang dilakukan oleh Basyar Asad. Kemudian sistem ekonomi diganti menjadi sistem perekonomian rente yang dimana perekonomian dikontrol dan dikuasai oleh orang- orang yang memiliki kedekatan dengan rezim Basyar Asad.

Berdasarkan analisa dari berbagai sumber, penulis menarik kesimpulan mengenai upaya demokratisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Melalui *Forward Strategy for Freedom in the Middle East*, Amerika Serikat menggunakan dua cara dalam demokratisasinya, yakni menggunakan liberalisasi dan partisipasi politik sipil.

Bentuk liberalisasi sipil ini adalah terjadinya demonstrasi atau bahkan sabotase yang dilakukan oleh rakyat sipil. Demokratisasi yang dilakukan di Irak membuat adanya pergerakan massa di Irak. Massa memaksa pemerintahan Saddam Husein turun dari jabatannya. Pemerintahan yang otoriter menjadi penyebab rezim ini diturunkan. Ditambah lagi dengan keadaan masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah serta korupsi yang tinggi. Sekitar tujuh juta penduduk Irak berada di bawah garis kemiskinan.

Demonstrasi juga berlangsung di Suriah. Berawal dari penangkapan pelajar yang menyerukan tuntutan agar rezim Basyar Assad turun. Mengetahui para pelajar tersebut mengalami penyiksaan selama ditahan, maka lahirlah gelombang protes yang lebih besar. Protes yang terjadi pada 11 Maret 2011 ini menuntut agar pemerintah membebaskan anak- anak yang telah dipenjarakan. Namun, pemerintah merespon dengan cara yang tidak mereka harapkan. Akhirnya berlangsunglah konflik berkepanjangan antara para demonstran dan pihak keamanan.

Selanjutnya, partisipasi politik sipil yang terjadi adalah adanya konflik antar etnis di Irak dan Suriah. Di Suriah, kelompok Kurdi dan Syiah merasa sangat diuntungkan dengan adanya proses politik di Irak, namun kelompok Sunni merasa dirugikan. Etnis Kurdi merasa diuntungkan dalam politik dan juga budaya. Hal ini

dikarenakan Kurdi memenangkan pemilu dengan perolehan suara yang signifikan. Kemudian Syiah merupakan kelompok yang dominan dalam pemerintahan. Keadaan berbeda terjadi pada kelompok Sunni. Dimana pada awalnya Sunni merupakan kelompok yang menguasai pemerintahan, namun kini harus kehilangan kekuasaannya.

Kemudian di Suriah, terjadinya perebutan kekuasaan antara kelompok pemerintahan yang dibantu oleh Rusia dan kelompok Hizbullah dengan kelompok oposisi yang mayoritas merupakan Sunni serta dengan para jihadis yang menginginkan Suriah menjadi Negara khilafah. Dalam kasus ini, Amerika membantu para oposisi untuk melawan kedua kelompok lainnya dengan tujuan agar dapat menguasai pemerintahan.

Liberalisasi dan partisipasi politik sipil yang terjadi di Irak dan Suriah memang dapat dikatakan telah berhasil dalam menggerakkan partisipasi politik masyarakatnya. Namun, demokratisasi yang terjadi justru sebaliknya. Demokratisasi mengalami kegagalan dalam menjalankan prosesnya. Hal ini dikarenakan terjadinya konflik berkepanjangan yang diakibatkan oleh partisipasi politik rakyat yang dianggap belum siap menerima demokrasi. Sehingga yang akhirnya didapat oleh Irak dan Suriah bukanlah demokrasi, melainkan konflik serta masalah- masalah besar lainnya.